



DAPUR GRATIS
Kelompok Siaga Bencana (KSB) Bukik Batabuah Kecamatan Canduang, mendirikan posko dapur gratis bagi relawan di jalur evakuasi Batu Palano. (kasnadi.np)

Besok, Pendaftaran Seleksi Petugas Haji Mulai Dibuka

JAKARTA - SINGGALANG

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama membuka pendaftaran seleksi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kelompok Terbang (Kloter) dan PPIH Arab Saudi dimulai, Kamis (7/12/2023) besok.

"Hari ini, kami umumkan ke publik bahwa pendaftaran seleksi petugas haji untuk PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi akan segera dibuka. Proses pendaftaran akan berlangsung dari 7 sampai 17 Desember

2023," ujar Direktur Bina Haji Ditjen PHU Arsad Hidayat di Jakarta, Selasa (5/12/2023).

Arsad mengatakan seleksi petugas haji dilakukan secara berjenjang mulai tingkat kabupaten/kota. Para peserta yang memenuhi persyaratan harus mengikuti computer based test (CAT).

Seleksi CAT tingkat kabupaten/kota akan digelar pada 21 Desember 2023. Peserta yang lolos pada tahap pertama ini akan ikut seleksi tingkat provinsi.

Peserta yang berhak ikut seleksi tahap provinsi akan diumumkan pada 23 Desember 2023. Pada tingkat provinsi, selain CAT, para peserta juga

harus mengikuti wawancara yang dilaksanakan pada 28 Desember 2023.

"Hasil seleksi tingkat provinsi akan diumumkan pada 11 Januari 2024," kata Arsad, seperti diwartakan Antara, kemarin.

Dirjen PHU Hilman Latief menegaskan seluruh calon petugas haji Indonesia harus melek digital seiring dengan perkembangan layanan di Arab Saudi. Hilman menjelaskan tahun ini Kemenag memulai rekrutmen petugas haji dengan memanfaatkan teknologi digital.

Pendaftaran petugas dilakukan dengan mengirimkan berkas pendaftaran melalui form

digital atau email yang sudah disiapkan. Tidak perlu langsung datang ke Kantor Kemenag kota/kabupaten.

Menurutnya, strategi tersebut menjadi upaya Kemenag untuk mewujudkan proses rekrutmen petugas haji yang lebih terbuka. Dengan proses penyampaian dokumen melalui email, membuka ruang bagi calon petugas untuk mendaftar, meskipun domisilinya jauh dari kantor Kemenag kota/kabupaten.

"Semangat penggunaan teknologi digital ini juga untuk memberi kemudahan dan kesempatan yang sama bagi semua calon petugas," kata Hilman. (●)

TOLAK PENETAPAN RUU DKJ

PKS Tetap Ingin Jakarta Jadi Ibu Kota Negara

Jakarta, Singgalang

DPR menggelar rapat paripurna ke-10 masa Ppsridangan II tahun sidang 2023-2024. Salah satu agendanya adalah menetapkan rancangan undang-undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi RUU usul inisiatif DPR.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR menjadi satu-satunya yang menolak RUU DKJ. Mereka berpendapat, Jakarta masih dianggap layak sebagai ibu kota negara Indonesia.

"Kami menyimpulkan bahwa DKI Jakarta masih layak menjadi ibu kota negara," ujar anggota Fraksi PKS DPR Hermanto dalam rapat paripurna di Jakarta, Selasa (5/12/2023).

Terdapat delapan poin penolakan dari Fraksi PKS terhadap penetapan RUU DKJ menjadi RUU usul inisiatif DPR. Pertama,

Fraksi PKS berpandangan bahwa penyusunan RUU DKJ tergesa-gesa dan terkesan ugali-ugalan. Padahal, peraturan terkait Jakarta yang tak lagi sebagai ibu kota negara seharusnya sudah ada sebelum Undang-Undang Nomor 3 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

"Karena penerapan Undang-Undang Pemerintah Daerah pada Jakarta membutuhkan banyak penyesuaian dan membutuhkan masa transisi yang panjang," ujar Hermanto, seperti diwartakan *Republika.co.id*.

Kedua, Fraksi PKS mengacu Pasal 41 Ayat 2 UU IKN yang dijelaskan, undang-undang terkait Jakarta yang tak lagi menjadi ibu kota negara harus selesai dua tahun setelah UU IKN diundangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka tak yakin RUU DKJ selesai

dengan tetap mengedepankan keterbukaan pembahasannya.

Ketiga, rancangan pemerintahan Jakarta menjadi pusat ekonomi ini akan berimplikasi terhadap Jakarta secara keseluruhan implikasi perubahan regulasinya. Keempat, RUU Daerah Khusus Jakarta belum melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation.

"Kelima, bahwa memaksakan pembahasan dalam waktu yang sangat sempit selain mempertaruhkan substansi peraturan, juga akan berdampak pada terbatasnya waktu bagi masyarakat berpartisipasi dalam proses penyusunan RUU Jakarta," ujar Hermanto.

Keenam, dalam Pasal 22 Ayat 1 draf RUU DKJ tidak disebutkan adanya lembaga adat dan kebudayaan Betawi.

Khususnya dalam pemajuan kebudayaan, pelibatan badan usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan.

Ketujuh, usulan pemilu gubernur, wakil gubernur, bupati wali kota, dan wakil wali kota perlu dipertahankan untuk mewujudkan demokrasi secara lebih konsisten. Atau sebagai alternatif, dapat mengusulkan mekanisme pemilihan oleh anggota DPRD jika ingin dikedepankan adalah pertumbuhan ekonomi yang memajukan kestabilan politik.

"Delapan, bahwa belum terlihat aturan yang memperlihatkan memberikan kekhususan yang dapat mempertahankan bahkan meningkatkan posisi Jakarta sebagai pusat perekonomian Indonesia," ujar Hermanto. (●)

KSB Bukik Batabuah Dirikan Dapur Gratis untuk Relawan

AGAM - Pasca erupsi Gunung Marapi, Kelompok Siaga Bencana (KSB) Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, mendirikan posko dapur gratis bagi relawan di jalur evakuasi Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua.

Kehadiran posko bertuliskan 'Dapur Kopi dan Teh untuk Relawan' itu, manfaatnya cukup besar. Apalagi letaknya di jalur evakuasi pasca erupsi Marapi yang terjadi, Minggu (3/12) sekitar pukul 14,54 WIB.

Seperti diketahui, letusan kepundan Marapi itu cukup dahsyat. Mengejutkan masyarakat salingka gunung. Bahkan, dampaknya membawa korban jiwa, yakni sejumlah pendaki yang terjebak saat erupsi. Ada puluhan korban meninggal.

Agus Nardi Tengku, Koordinator Tanggap Darurat KSB Bukik Batabuah menjelaskan, munculnya inisiatif dari anggota KSB mendirikan dapur gratis kopi dan teh ini dikarenakan di lokasi jalur evakuasi itu tidak ada posko yang melayani relawan. "Makanya kita mendirikan posko ini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan relawan, walau hanya secangkir kopi dan teh manis," katanya.

Hal senada dikatakan Romi Pasla, Sekretaris Aksi Peduli Nagari (APN) Bukik Batabuah sekaligus anggota KSB Bukik Batabuah, bahwa proses memasak air dilakukan dengan cara manual. Menggunakan kayu bakar dan anggota KSB hanya memberikan cangkir dan mengisi air. Sementara para relawan mengambil kopi atau teh, sesuai selera.

Namun demikian, katanya, KSB juga menyediakan makanan ringan seperti roti.

Ada 4 anggota KSB di sana, selain Agus Nardi Tengku dan Romi Pasla, juga ada Syahril Ramadhan (Ketua Karang Taruna Kecamatan Canduang) dan Doni. (511)

Pasca Erupsi Gunung Marapi, PLN Pastikan Aliran Listrik Aman

BUKITTINGGI - PT PLN (Persero) memastikan pasokan listrik di wilayah terdampak bencana erupsi Gunung Marapi, Sumatera Barat, berjalan dengan normal tanpa gangguan.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat Eric Rossi Priyo Nugroho menyebut kondisi penyulang, pembangkit, SUTT dan Gardu Induk aman. Tidak ada pemadaman karena gangguan listrik pasca terjadinya erupsi.

"PLN menjaga keandalan suplai listrik di wilayah terdampak untuk memastikan warga mendapatkan listrik di tengah kecemasan yang melanda akibat erupsi. Kondisi pembangkit yang berada pada radius Gunung Marapi terpantau aman, seperti PLTA Maninjau, PLTA Singkarak dan PLTA Batang Agam," ungkap Eric.

Selain itu, pemantauan petugas di lapangan juga mencatat kondisi operasional Gardu Induk (GI) Padang Luar, GI Batusangkar, GI Padang Panjang dan GI Maninjau yang mensuplai listrik lebih kurang 182.000 pelanggan terdampak erupsi terpantau aman.

Eric menyebutkan, selain menjaga keandalan listrik, PLN juga mempersiapkan genset untuk cadangan keperluan publik yang mendesak.

"Petugas dan peralatan di 6 Unit Layanan Pelanggan (ULP) yang terdampak seperti genset juga disiapkan untuk gerak cepat PLN menjaga dan memulihkan pasokan listrik bila terjadi gangguan akibat erupsi," terangnya lagi. (105)



PETUGAS PLN - Dua petugas PLN memastikan pasokan listrik di wilayah terdampak bencana erupsi Gunung Marapi, agar berjalan dengan normal tanpa gangguan. (isu)

Erupsi Sejumlah Gunung Berapi, Belum Ada Penerbangan Terdampak

JAKARTA - Perusahaan Umum Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) atau AirNav Indonesia menyatakan sampai saat ini tidak ada penerbangan yang terdampak dari erupsi empat gunung berapi.

"Hingga statement ini dikeluarkan, belum ada penerbangan yang terdampak," ucap Sekretaris Perusahaan AirNav Indonesia Hermana Soegijantoro di Jakarta, Selasa (5/12/2023), seperti diwartakan *Republika.co.id*.

Pada 3 Desember 2023 dilaporkan terjadi letusan Gunung Marapi pukul 16.40 UTC atau 3 Desember 2023 pukul 23.40 WIB, selang beberapa jam kemudian pukul 21.30 UTC atau 4 Desember 2023 pukul 04.30 WIB terjadi letusan Gunung Semeru, dan di hari yang sama selang 23 menit pukul 21.53 UTC atau 4 Desember 2023 pukul 04.53 WIB juga terjadi letusan Gunung Lewotolo. Kemudian, pada 3 Desember 2023 pukul 01.30 UTC atau 4 Desember 2023 pukul 08.30 WIB telah terjadi letusan Gunung Marapi kembali.

Berikutnya, pada 4 Desember 2023, juga terjadi letusan Gunung Anak Krakatau pukul 04.10 UTC atau 4 Desember 2023 pukul 11.10 WIB dengan ketinggian A050 angin mengarah ke Barat Laut. Terkait hal tersebut, AirNav Indonesia juga telah menerbitkan informasi ASHTAM dengan nomor: ASHTAM Krakatau: VAWR2772, ASHTAM Marapi: VAWR2769, dan ASHTAM Lewotowo: VAWR5853.

Diketahui, Badan Geologi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah mengeluarkan rekomendasi terkait status Waspada (Level II) Gunung Marapi. Rekomendasi itu, di antaranya meminta masyarakat/wisatawan tidak beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah harus dipatuhi untuk keselamatan bersama.

"Gunung Marapi telah mengalami erupsi dengan tinggi kolom abu teramati 800 meter dari puncak pada tanggal 4 Desember 2023 pada pukul 22:00 WIB. Kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam intensitas tebal condong ke arah barat daya. erupsi ini terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 3 mm dengan durasi kurang lebih 1 menit 8 detik," kata Plt Kepala Badan Geologi Muhammad Wafid dalam konferensi pers terkait Perkembangan Aktivitas Gunung Marapi pada Senin (4/11/2023).

Gunung Marapi lanjut Wafid saat ini berada pada level II (Waspada) dan sudah direkomendasikan masyarakat di sekitar Gunung Marapi dan pengunjung ataupun wisatawan tidak diperbolehkan mendaki Gunung Marapi pada radius 3 km dari kawah. (●)

Tatanan Adat dan Budaya Selamatkan Masyarakat dari Permasalahan

BUKITTINGGI - Di zaman sekarang ini, tantangan untuk membuat generasi muda memahami dan mengamalkan nilai adat dan budaya semakin sulit. Hal ini dikarenakan banyak tantangan yang menjadi pengalihan dari nilai-nilai tersebut, di antaranya seperti konsumsi teknologi dan kecenderungan kebiasaan yang terbentuk dalam keseharian generasi muda.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Supardi, saat menjadi pembicara dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pemangku Kebudayaan Kota Payakumbuh, Senin (4/12) di Hotel Tripletree, Bukittinggi.

Bimtek bertemakan "Implementasi Peradilan Adat, Mengaktifkan Kembali Hakim dan Polisi adat" tersebut, berlangsung selama tiga hari, 3 hingga 5 Desember. Bimtek tersebut dilaksanakan dengan menggunakan dana pokok pikiran generasi muda juga cenderung tidak semudah dulu karena mereka lebih pandai menguasai teknologi dibanding orang yang lebih tua.

Supardi mengajak para peserta acara tersebut untuk menggenarkan gerakan menanamkan nilai adat dan budaya di tengah masyarakat.



BIMTEK - Ketua DPRD Sumbar, Supardi, beserta sejumlah pembicara saat menghadiri acara Bimtek Peningkatan Kapasitas Pemangku Kebudayaan Kota Payakumbuh, Senin (4/12) di Hotel Tripletree, Bukittinggi. (ist)

Terutama pada generasi muda yang merupakan penerus bangsa dan daerah.

"Generasi mudalah yang nantinya akan meneruskan kita, menjaga adat dan budaya serta memajukan daerah ini," ujarnya.

Menurut Supardi, di zaman sekarang memang tidak mudah untuk menanamkan nilai adat dan budaya tersebut. Bahkan untuk memantau dan mengawasi kecenderungan perilaku generasi muda juga cenderung tidak semudah dulu karena mereka lebih pandai menguasai teknologi dibanding orang yang lebih tua.

Bahkan, Supardi mengatakan, ada kecenderungan

kebanyak generasi muda tak lagi menghargai atau memahaminya berharganya nilai adat dan budaya. "Ini kecenderungan yang terjadi hampir di 18 kabupaten/kota," ujarnya.

Pada, lanjut Supardi, bagaimana pun melesatnya perkembangan zaman, nilai adat dan budaya merupakan bekal yang amat berguna dalam mengarungi kehidupan. Tatanan adat dan budaya sudah terdesain menyelamatkan masyarakat dari berbagai permasalahan.

Salah satu contohnya dalam permasalahan anak kurang gizi atau stunting. Dalam nilai adat dan budaya Minangkabau, lanjut Supardi, sudah ada

penataan tentang ketahanan pangan keluarga dan suku. Jika hal ini diterapkan permasalahan stunting sangat bisa dihindari.

"Di Payakumbuh angka stunting relatif tinggi. Ini menjadi permasalahan yang mesti kita entaskan bersama," katanya.

Selain itu, Supardi mengatakan, adat dan budaya tidak bisa dinilai sebagai hal kuno yang tak sejalan dengan kebutuhan masa depan. "Justru dengan nilai adat dan budaya yang sudah ada ini kita bisa menjadi daerah yang maju," tegas Supardi.

Ia mencontohkan, salah satunya Maek. Peradaban kuno ini di Limapuluh Kota. Ia mengatakan, jika diekspos dengan baik, Maek akan menjadi hal yang menarik perhatian dunia.

Menurut dia, Maek merupakan peradaban kuno yang sangat bernilai wisata sejarah. Begitu juga dengan adat dan budaya lainnya di Sumbar, hal ini bisa menjadi potensi besar untuk memajukan daerah dan masyarakatnya.

"Pengelolaan adat budaya secara optimal akan menjadi pelestarian yang efektif untuk nilai adat dan budaya itu sendiri. Selain itu juga menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pengangguran karena sektor pariwisata yang digerakkan dengan mengekspos adat dan budaya" katanya. (401)



DPRD Sumbar Tetapkan Perda Tentang Tanah Ulayat



PADANG - SINGGALANG

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang tanah ulayat menjadi peraturan daerah (perda) pada rapat paripurna, Senin (4/12) di ruang sidang utama gedung DPRD.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar didampingi Wakil Ketua DPRD Suwirpen Suib dan dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansyarullah didampingi Sekda prov Hansastri.

Saat memimpin rapat paripurna, Irsyad Safar mengatakan, tanah ulayat merupakan identitas masyarakat hukum adat di Sumatera Barat. Terhapusnya tanah ulayat berarti hapus pula identitas adat.

"Melindungi keberadaan tanah ulayat merupakan perjuangan untuk mempertahankan identitas masyarakat hukum adat itu sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa pemberian tanah ulayat beralih status menjadi tanah hak dan tanah negara telah mengancam keberadaan tanah ulayat," kata Irsyad Safar.

Dalam praktik administrasi pertanahan, lanjut Irsyad, praktik peralihan tanah ulayat itu diikuti dengan pendaftaran tanahnya menjadi tanah hak atau tanah negara.

Irsyad menyebutkan, pengakuan tanah ulayat tersebut perlu diikuti dengan tindakan nyata pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk pengadministrasian tanah ulayat.

"Oleh karena itu pengaturan tanah ulayat di daerah hendaknya dapat membantu dan mendorong upaya percepatan pengadministrasian pengakuan tanah ulayat sehingga terintegrasi dengan sistem administrasi pertanahan," terangnya.

Ia memaparkan, Perda tentang Tanah Ulayat menegaskan bahwa hukum adat merupakan hukum yang berlaku atas tanah ulayat. Artinya, Perda tersebut bukan untuk mengubah atau-



pun menggantikan kedudukan hukum adat dalam pengaturan pemilikan dan penguasaan tanah ulayat.

"Perda tentang Tanah Ulayat ini bukan mengubah atau menggantikan hukum adat namun justru untuk mempertegas kedudukan hukum adat tentang hak ulayat dan tanah ulayat," tegas Irsyad.

Dia menegaskan, Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dengan tegas memberikan pengakuan terhadap keberadaan hak ulayat dan tanah ulayat. UUPA bahkan menyatakan hukum adat sebagai dasar pengaturan tanah ulayat merupakan hukum positif tidak tertulis dalam hukum agraria.

Sementara itu, dia melanjutkan, tanah ulayat merupakan identitas masyarakat hukum adat di Sumatera Barat. Melindungi keberadaan tanah ulayat merupakan perjuangan untuk mempertahankan identitas tersebut. Pemberian peralihan status tanah ulayat menjadi tanah hak dan tanah negara telah mengancam keberadaan tanah ulayat.

Menurutnya, pengakuan tanah ulayat tersebut perlu diikuti dengan tindakan nyata pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk pengadministrasian tanah ulayat. Oleh sebab itu, pengaturannya di daerah hendaknya dapat membantu dan mendorong upaya pengadministrasian dimaksud sehingga terintegrasi dengan

sistem administrasi pertanahan.

Lebih jauh Irsyad menerangkan, Ranperda tentang Tanah Ulayat telah dilakukan pembahasan sejak akhir tahun 2022 lalu oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Komisi I sebagai tim pembahas. Setelah pembahasan dilakukan, Ranperda tersebut disampaikan untuk dilakukan fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hasil fasilitasi Kemendagri terhadap Ranperda Tanah Ulayat diterima tanggal 14 November 2023 melalui surat Mendagri nomor 100.2.16/7830/OTDA.

"Komisi I DPRD Sumatera Barat melakukan rapat untuk mengakomodir masukan, saran dan perbaikan dari Kemendagri berdasarkan hasil fasilitasi tersebut sehingga bisa diambil keputusan untuk menetapkan menjadi peraturan daerah," tutupnya.

Sebelumnya, untuk mengoptimalkan penyusunan perda tanah ulayat, tim penyusun dari Komisi I DPRD Sumbar sempat melaksanakan sosialisasi di sejumlah kabupaten/kota.

Saat sosialisasi itu, tim penyusun perda tanah ulayat memaparkan bahwa selain mengatasi polemik yang kerap terjadi dalam pengelolaan Tanah Ulayat, ranperda tersebut juga mendorong pendataan dan sertifikasi keseluruhan tanah ulayat yang ada.

Hal itu dikatakan anggota

juga akan membantu meramalkan pendataan.

Untuk diketahui sepanjang Tahun 2023, DPRD Sumbar telah menetapkan 8 ranperda, 4 ranperda inisiatif, 1 ranperda usulan Pemprov dan 3 perda kumulatif terbuka. Kemudian dari 8 ranperda, 6 telah ditetapkan menjadi perda.

Tentang 4 ranperda inisiatif 2 dari Komisi II, kemudian masing-masingnya 1 dari Komisi I, dan IV. Rinciannya adalah, Perda Nomor 3 tahun 2023 Tata Kelola Komoditi Unggulan Perkebunan Sumatera Barat, Ranperda Perhutanan Sosial, Ranperda Tanah Ulayat dan Perda Nomor 4 tahun 2023 tentang Penanggulangan Kebencanaan.

Untuk Ranperda Tanah Ulayat dan Ranperda Perhutanan Sosial sudah ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Sumbar, dan sudah dalam pengusulan ke Kementerian Dalam Negeri, menunggu nomor registrasi.

Lalu, 4 perda usulan pemprov yang telah ditetapkan DPRD Sumbar yakni, Perda Ekonomi Kreatif, dan 3 Perda kumulatif terbuka, Perda Pertanggungjawaban APBD 2022, Perda Perubahan APBD 2023 dan Perda APBD 2024. (*)

